

RINGKASAN

**Putri Nanda Mulyana
Nim 210510272**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP
PEMANFAATAN TANAH MILIK NEGARA**
(Studi Penelitian Dikampus Bukit Indah
Universitas Malikussaleh)
**(Dr Malahayati, S.H., LL.M., dan Dr.
Mukhlis, S.H., M.H.)**

Hak penguasaan negara atas tanah diatur Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan peraturan terkait, seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketimpangan antara idealisme dan kenyataan, terutama pada pemanfaatan tanah milik Universitas Malikussaleh di Bukit Indah. Tanah yang seharusnya dikelola untuk kepentingan publik dan akademik justru diklaim dan digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kepentingan pribadi, termasuk merusak atau menghilangkan batas-batasnya. Kondisi ini menegaskan adanya konflik penggunaan lahan dan perlunya penegasan kembali hak negara serta perlindungan aset publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat di sekitar Kampus Bukit Indah, serta mengetahui tingkat kepatuhan hukum mereka terhadap regulasi terkait pemanfaatan lahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris. Data dikumpulkan dari wawancara dengan Kepala Biro dan Staf Unimal, Geuchik dan pelaku usaha yang memanfaatkan lahan negara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan analisis data secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan milik negara di sekitar Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh dilakukan secara ilegal oleh masyarakat untuk mendirikan berbagai usaha seperti kantin, kafe, fotokopi, dan rumah sewa. Pelanggaran ini terjadi karena tingkat kepatuhan hukum yang rendah, didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak dan diperparah oleh kesulitan mengurus izin serta adanya toleransi dari pihak desa dan universitas yang bertujuan menghindari konflik sosial. Kondisi ini menyoroti sebuah dilema kompleks di mana kebutuhan ekonomi masyarakat berbenturan dengan peraturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960. Maka dari itu, penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan seimbang antara penegakan aturan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kesimpulannya adalah pemanfaatan lahan milik negara di sekitar Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh oleh masyarakat terjadi secara ilegal akibat rendahnya kepatuhan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, disertai sosialisasi peraturan yang jelas, sehingga keseimbangan antara perlindungan aset dan kesejahteraan warga dapat tercapai.

Kata Kunci : Tanah Negara, Aset Negara, Masyarakat.